

DAFTAR PUSTAKA

- A. Asri Harahap, 2000, *Pembagian Kekuasaan Pusat dan Daerah ; Pengalaman Masa Lalu dan Idaman Masa Depan*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Mufiz, 2008, *Lembaga Pelayanan Terpadu Sebagai Langkah Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Makalah Workshop Pelayanan Terpadu.
- Amran Muslimin, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Bina Cipta, Jakarta.
- Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, AR-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Arif Nasution, 2000, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Ateng Syafrudin, 1999, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 2003, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Berg, B. L. (2001). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. (Sarah L. Kelbaugh, Ed.) (4th ed.). United State of Amerika: California State University.
- Dadang Solihin, 2003, *Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia, Jakarta.

Deddy Supriady, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2011), 80–88. Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Andi. 2005.

Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Cet. Pertama Sinar Grafika, Jakarta.

I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta,

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa.

Mashuri Mashab, 1999, *Otonomi Daerah*, Karya Putra, Yogyakarta.

Mohammad, I. (2003). *Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi*. Seminar Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi oleh Bappenas. Jakarta.

Muchan, 2000, *Otonomi Daerah dan Ketidakadilan Daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia.

Rosyidah Rakhmawati, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global, Cet.Kedua* (Malang: Bayumedia Publishing).

Siagian,Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan : Konsep , Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soetandyo Wignjosebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Syaukani HR, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

